

## **Menggali Sejarah dan Budaya Maritim di Indonesia: Implementasinya Menuju Kebangkitan Maritim Indonesia**

Oleh : **Anhar Gonggong**  
Pelajar Sejarah

**“Sejarah tidak berulang, tapi memang berirama” (Mark Tutain)**  
**“Pelajari masa lalu bila kamu hendak menentukan masa depan”**  
**(Confucius)**

### **1. Pendahuluan: Lontaran Ide Presiden RI, Jokowi**

Sepanjang yang saya ketahui, “mungkin baru” Ir. Joko Widodo (selanjutnya Presiden Jokowi) Presiden Republik Indonesia (RI) yang memberikan landasan untuk memperhatikan posisi geografi laut dalam wilayah negara merdeka RI. Yang saya maksudkan adalah lontaran konseptualnya dalam rangka posisi laut secara internal, yaitu: Tol Laut. Sedang konsep yang berkaitan dengan pengembangan kelautan secara antar bangsa-bangsa – setidaknya Asia Tenggara – digunakan kata “Poros Maritim Dunia”.

Ketika melihat bahwa selama ini kita sebagai bangsa yang memiliki wilayah kepulauan yang bertaburan di atas laut, justru memungguni laut! Tentu saja, walaupun Presiden memberikan lontaran pemikiran yang sangat penting di dalam kelangsungan hidup kita di periode-periode selanjutnya, harus diakui, usaha perwujudannya tentu saja tidaklah mudah. Untuk mewujudkan Tol Laut tentu diperlukan, tidak hanya biaya yang harus tersedia, tetapi yang tidak kurang pentingnya adalah harus terbangun kesadaran secara luas di dalam warga masyarakat, bahwa mengelola laut dengan baik diperlukan pengetahuan yang cukup dan terpercaya dalam praktek di hari kini dan di hari depan. Laut adalah sumber kelangsungan hidup bersama kita sebagai warganegara RI di hari depan. Sedang yang berkaitan dengan perwujudan Poros Maritim Dunia, tentu kita sudah harus memiliki pelbagai hal, yang berkaitan dengan sarana-sarana yang dapat membangun kepercayaan bangsa-bangsa lainnya. Dalam kaitan ini, para diplomat kita sudah harus memiliki kemampuan jabaran yang (akan) terlihat oleh bangsa-bangsa lain, khususnya anggota ASEAN. Dalam kaitan dengan hal itu, mungkin dari segi inilah diperlukannya perluasan wawasan kemaritiman warga kerajaan-kerajaan, negara-negara di Nusantara – yang kini, sejak 17-18 Agustus 1945, menjadi RI – yang berkembang dan menjadi negara-negara maritim,

penjelajah laut di masa lampau; pemahaman tentang gerak kemaritiman oleh kerajaan-kerajaan di nusantara dengan latar sejarahnya masing-masing.

## 2. Kerajaan-kerajaan Maritim di Nusantara dan Penguasaan Jalur Laut Mereka

Dalam kaitan dengan posisi dari Kemaritiman Indonesia, J.N.F.M.A. Campus dari *Erasmus Universiteit Rotterdam* memberikan keterangan yang patut diketahui:

“Proses formasi Indonesia sebagai negara maritim sudah berlangsung sepanjang sejarah Indonesia itu sendiri. Lokasi yang strategis sebagai persimpangan dalam jaringan pelayaran dan perdagangan dunia antara Barat dan Timur dan didukung oleh produk yang dihasilkan oleh daerah-daerah dan pulau-pulau yang tersebar luas merupakan faktor konstan dalam proses formasi negara Indonesia sebagai negara maritim sejak masa awal hingga masa kini. Proses formasi itu sendiri juga merupakan hasil interaksi antara kekuatan-kekuatan internal dan eksternal” (*Indonesia As A Maritim State*”, di Kajian Sastra

Jurnal Ilmiah Bidang Bahasa, Sastra dan Kebudayaan, Nomor 4, Tahun XXIV, Oktober, 2000, hal. 469)

Ketika seorang mencari gambaran tentang situasi dikelampauan Nusantara (yang kini bernama Republik Indonesia sebagai Negara Merdeka Kesatuan), maka pasti akan menemukan dua kerajaan tradisional di abad-abad sebelum kedatangan bangsa-bangsa asing – imperialis; kedua kerajaan yang dimaksud pastilah Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Majapahit di Jawa. Kedua Kerajaan tradisional ini telah menjadi nama ingatan kolektif di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya di kalangan ilmuwan, bahkan juga di tengah-tengah masyarakat awam-biasa. Sejalan dengan itu, ketika Ir. Soekarno – sebagai Ketua/Pimpinan Partai Nasional Indonesia (PNI), pada tahun 1930, diadili di depan pengadilan kolonial di Bandung, beliau memberikan pidato pembelaannya – ketika diterbitkan sebagai buku, berjudul: *Indonesia Menggugat*; beliau memberikan gambaran tentang tingkah-laku dari kedua kerajaan ini sebagai kerajaan besar. Beliau menyebut Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menjelajahi “seantero wilayah”, kerajaan-kerajaan lain. Dan karena itu, Ir. Soekarno menyebut sifat kedua kerajaan, di Nusantara ini sebagai imperialis, yaitu *imperialisme kuno*. Selanjutnya, ketika merumuskan jawabannya terhadap pertanyaan dari Ketua dan Pimpinan sidang BPUPK, Dr. Rajiman Wedyodiningrat, apa dasar negara jika

Indonesia merdeka kelak? Pada tanggal 1 Juni 1945, beliau juga menyebutkan bahwa hanya Sriwijaya dan Majapahit yang dapat disebut sebagai negara yang “bersifat nasional”.

Tentang Kerajaan Sriwijaya, Prof. Dr. Slamet Muljana telah menulis sebuah buku khusus tentang kerajaan besar ini. Menurut Prof. Slamet Muljana, “sejarah Sriwijaya timbul lagi, setelah penelitian dan penemuan Prof. George Coedes pada tahun 1918. Sejak itu, berkembanglah minat untuk melakukan penelitian tentang kerajaan ini, termasuk oleh para sarjana-sarjana bangsa Indonesia. Tentu saja para peneliti menggunakan keahliannya masing-masing, terutama ilmu arkeologi dan sejarah. Sumber-sumber penelitian yang digunakan tentu saja dari pelbagai pihak, termasuk dari tulisan-catatan dari pesiarah-musafir dari Cina dan Arab. Tetapi dari penelitian ahli-ahli itu, tentu terdapat perbedaan-perbedaan pendapat; misalnya tentang tempat keberadaban dari Kerajaan tersebut. Ada sarjana yang berpendapat bahwa pusatnya ada di Palembang; tetapi ada juga yang berpendapat pusat Sriwijaya ada di Jambi. Tetapi mereka memang semua sepakat bahwa Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bersifat kemaritiman, bahkan juga telah bersaing dengan kerajaan-kerajaan asing, termasuk dengan Kerajaan India Selatan → Kerajaan Colamandala juga terjadi persaingan dengan kerajaan-kerajaan Nusantara lainnya (baca: Prof. Dr. Slametmuljana, Sriwijaya, Arnoldus, Ende - Flores N.T.T, tanpa angka tahun, Passim, (Lihat juga Armijn Pane’, Djalan Sedjarah Dunia, W. Versyluys N.V. Amsterdam-Djakarta, 1951, 117-119).

Madjapahit, adalah Kerajaan di Nusantara yang paling banyak mendapat pembicaraan di antara para ahli, tetapi juga pembicaraan di tengah-tengah masyarakat umumnya. Dan karena itu, ingatan kolektif tentang Majapahit tertanam pada masyarakat umum.

Buku tentang perjalanan hidup dari kerajaan ini telah ditulis oleh banyak ilmuwan maupun oleh peminat sejarah dan arkeologi. Salah seorang yang sangat menikmati Kerajaan Madjapahit ialah seorang tokoh politik yang memang multitalenta, Mr. Muh. Yamin; beliau adalah seorang politikus, seorang ahli hukum, seorang Sastrawan-Budayawan. Beliau telah menulis buku, antara lain Tatanegara Madjapahit Sapta - Parwa, jajasan Prapantja, Djakarta. Juga telah menulis “*Biografi Gajah Mada*”. Seorang ilmuwan sejarah Belanda, Bernard H.M. Vlekke menulis buku Nusantara Sejarah Indonesia, (KPG, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2018). Telah menyatakan tentang keadaan-keadaan Kerajaan

Madjapahit. Dalam kaitan dengan pembesar Madjapahit yang dianggap “besar”, Vlekke menulis:

“Gadjah Mada adalah salah seorang tokoh paling menarik, namanya terus hidup sebagai seorang negarawan besar yang dikatakan telah mempersatukan seluruh Indonesia di bawah satu raja.

Gadjah Mada, kata Pararaton, adalah perwira pengawal raja, ketika Kerajaan Majapahit dipecah-belah oleh pertentangan internal dan pemberontakan. Suatu ketika raja harus melarikan diri dari ibukotanya dan tampaknya semua harapan sudah luluh ketika Gadjah Mada membawa keselamatan. Dia menghancurkan pemberontakan tentara pengawal dan mengawal raja ke tempat persembunyian yang aman” (hal. 65).

Tentang kekuasaan Madjapahit, Armijn Pane menuliskan bahwa “Madjapahit sangat berkuasa di timur dan utara Nusantara. Madjapahit makin lama makin berkembang, terutama atas usaha patih Gadjah Mada. Tahun 1343 Bali ditaklukan. Seperti biasa bagi Kerajaan-kerajaan Nusantara dahulu. Madjapahit sering mengirim utusan ke Tiongkok. Madjapahit sangat luas daerahnya ialah dalam zaman Hayam Wuruk (1350-1389). Seluruh Nusantara digenggamnya. Semuanya itu tentunya karena mengingat pelajaran dan perdagangan. Dikatakan selanjutnya “supaya tetap memegang jalur perdagangan di Nusantara, Majapahit terus berusaha melemahkan saingan, dan terus memperkuat kedudukan di tempat-tempat penting; terutama di Jawa Barat, Sumatera Timur dan di tepi Selat Malaka. Tanah Sunda penting supaya dapat menguasai Selat Sunda, karena dari sanalah jalan angkutan lada dari Sumatera Barat dan Lampung. Ada bukti juga pengaruhnya sampai ke Philipina, tetapi melalui wilayah kuasanya di Kalimantan; barang dagangan yang dibawa ke Philipina, seperti barang-barang kerajinan tangan, kain tenunan, barang buatan dari logam, dan bermacam-macam jenis perhiasan.

Setelah mengalami kemajuan kekuasaan yang luas di Asia Tenggara beserta kemakmuran kerajaannya, maka kerajaan besar ini mengalami (proses) kemunduran bahkan berakhir sebagai negara kerajaan di Nusantara. Penyebab dari keruntuhan Majapahit, menurut Prof. H. Yamin, dengan mengutip Prof. N.J. Krom yang menyatakan:

“Maka ahli sejarah itu berpendapat bahwa keruntuhan didahului oleh pusat kekuasaan, dan pelemahan ini tidaklah

disebutkan terutama sekali oleh pertentangan antara agama Hindu yang sedang turun dan agama Islam yang sedang naik, melainkan semata-mata oleh pertentangan dalam negeri... jadi di lapangan pertentangan yang memundurkan Madjapahit dapatlah dilihat tiga unsur: perang saudara, pertentangan agama, dan perpindahan kekuasaan ke tangan rajakula yang lain” (Yamin, hal.227)

Kerajaan-kerajaan maritim di wilayah Nusantara – dalam posisi strategi wilayah kelautan-perdagangan dan peladjaran – tidak hanya Sriwijaya di Sumatera dan Madjapahit di Jawa, melainkan juga terdapat kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil dan lain-lain. Di Aceh pernah tampil sebagai kerajaan besar maritim, sejak abad ke-10 dan seterusnya. Aceh di bawah Iskandar Muda telah tampil sebagai penguasa laut di Selat Malaka. Sumbawa, Bima di NTB; demikian pula yang lainnya, seperti Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan.

Semua kerajaan-kerajaan yang ada, sampai nanti berlanjut ketika bangsa-bangsa asing imperialis Barat datang ke wilayah Asia, termasuk ke wilayah Nusantara, memang telah terjadi “persaingan” untuk menguasai jalan laut untuk pelayan dan perdagangan mereka. Mereka juga pada umumnya, berusaha untuk melakukan hubungan dengan kerajaan-kerajaan lainnya yang merupakan kerajaan-kerajaan “penguasa” seperti Kerajaan Tionghoa – sejalan dengan dinasti-dinasti yang berkembang ketika itu. Juga ketika Tiongkok dikuasai oleh bangsa mongol, yang menjelajahi lautan untuk “memaksakan” pengakuan kerajaan-kerajaan lainnya terhadap kerajaan dirinya. Dalam kaitan ini terkenal – dan saya kira sebagian dari kita telah mengetahui – cerita bagaimana pasukan Kublai Khan datang ke Jawa untuk melakukan penghukuman terhadap Kerajaan Jawa yang menolak melakukan pengakuan ketundukannya kepada Kerajaan Cina ini. Diceritakan bahwa:

Penguasa-penguasa di negeri-negeri dan pulau-pulau selatan, termasuk Kertanegara, tidak mau menyerah kepada sang kaisar. Tawarikh Cina menuliskan bagaimana duta-duta kaisar pergi ke Singasari dan memerintahkan rajanya datang sendiri ke istana yang mulia. Bukannya menurut, Kertanegara menangkap duta-duta itu lalu mengirim pulang mereka setelah membuat cacat wajah mereka. Bagi penguasa kerajaan “besar” Cina itu, setiap persoalan untuk datang bersujud sembah dan menyerahkan upeti, dianggap Cina sebagai penghinaan yang tidak bisa diterima terhadap “Putra Langit”, yang secara moral harus dihormati sebagai penguasa besar oleh semua raja lain.

Kebandelan Kertanegara harus dihukum, tentu saja. Cina perlu waktu beberapa tahun untuk mempersiapkan armada dan tentara. Pada tahun 1292, 1000 kapal mengangkut 20.000 tentara berlayar ke Selatan. ketika mereka tiba, Kertangara sudah wafat dan kekuasaannya hancur (lihat, Vlekke, hal. 61-62).

Setelah raja Kertanegara meninggal, maka situasi kerajaan yang ditinggalkannya sangat kacau. Tetapi di tengah-tengah kekacauan itu Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri dan menghimpun kekuatannya dan memulai – istilah yang digunakan oleh Vlekke “Perang Gerilya” → hal. 62-63 – melawan kekuatan inti para penyerbu. Dengan “kemenangan” Raden Wijaya itu, maka lahirlah kerajaan yang dibangunnya, “mengawali Kerajaan Jawa terakhir dan teragung imperium Majapahit” (Vlekke, hal.63)

### **3. VOC – Belanda “Menguasai” Kerajaan-Kerajaan Maritim Nusantara: Konflik antar Bangsa-Bangsa Imperialis di Eropa Barat Dampaknya Terhadap Nusantara**

Ada empat bangsa-bangsa dari Eropa Barat yang datang ke Asia, termasuk ke Nusantara. Tujuan utamanya mencari dan mengambil hasil bumi di wilayah ini, yang ketika itu – sejak sebelum masehi sampai abad 18 – sangat menguntungkan sebagai barang dagangan di dunia: rempah-rempah. Bangsa-bangsa itu ialah Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Untuk mendapatkan keuntungan perdagangan ekonomi yang dicarinya, mereka telah melahirkan tingkah laku persaingan, pertentangan, bahkan sampai kepada perang. Seorang ahli, Hasyim Djalal (ketika itu dari Dewan Maritim Indonesia) memberikan informasi tentang persaingan dari bangsa-bangsa asing yang datang ke Nusantara. Dikatakan:

“Pertarungan di antara negara-negara Barat untuk menguasai negeri kepulauan sangatlah hebat, terutama sejak ditemukannya jalan laut yang memasuki Kepulauan Nusantara oleh Portugis dan Spanyol. Portugis memasuki kepulauan Nusantara dari arah barat melalui Samudera Hindia, sementara itu Spanyol masuk dari arah timur melalui Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik.

Meski terdapat perbedaan rute antara kedua negara maritim abad 16/17 tersebut, namun terdapat persamaan sasaran pada keduanya yaitu berusaha mencari jalan ke Hindia yang sekarang adalah Kepulauan Indonesia, negeri penghasil rempah-rempah yang pada saat itu sangat dibutuhkan di Eropa”

(Lihat, Hasyim Djalal, *Deklarasi Djuanda dalam Perspektif Sejarah*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta, 2007, hal. 2-3).

Hasyim Djalal melanjutkan informasinya dengan:

“Setelah menemukan jalan ke Hindia, kedua *Super Power* maritim tersebut membagi dan menguasai dua samudera sebagaimana ditetapkan oleh Paus Alexander VI pada 1493, dan setahun kemudian diperkuat dengan Tordesillas. Kedua negara membagi laut di planet bumi yang bulat ini seperti membelah buah apel atau jeruk. Garis pembagi adalah dari utara ke selatan melalui Samudera Atlantik, yang terletak di sebelah barat Kepulauan Azores, tembus ke Pasifik Barat sehingga juga membelah Kepulauan Hindia (Indonesian). Kedua negara sepakat, laut bagian Barat dari Kepulauan Nusantara dianggap sebagai milik Portugis, sedang bagian timur dianggap sebagai milik Spanyol” (hal. 3).

Dengan Perjanjian Tordesillas yang menentukan hanya dua negara yang berhak melayari lautan bumi secara bebas, dianggap sebagai “pemilik”, tentu saja ditolak oleh bangsa-bangsa maritim lainnya. Di antara bangsa yang sangat menentang ketentuan itu, ialah Kerajaan Belanda. Untuk menghadapi ketentuan itu, Belanda meminta ahli hukum yang muda, Grotius (= Hugo Dee Groot). Profesor berhasil memenuhi keinginan Belanda pada tahun 1608 ia menerbitkan sebuah buku yang mengajarkan prinsip kebebasan-kebebasan lautan, dan membela hak-hak Belanda untuk berlayar ke timur. Lebih dari 50 tahun berikutnya, terjadi “pertarungan ilmiah” (*battle of the books*) antara prinsip kebebasan lautan yang dibela Grotius berhadapan dengan prinsip-prinsip kewenangan negara atas lautan yang dibela terutama oleh pakar-pakar hukum Portugis dan Spanyol (Hasyim Djalal, hal. 3).

Tetapi yang berkaitan dengan tujuan Belanda untuk memperoleh keuntungan pelayaran-perdagangan di tempat rempah-rempah, sebelum terbentuknya VOC, maka terjadi persaingan di antara perusahaan-perusahaan Belanda sendiri. Ketika itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang professor sejarah dari Australia, M.C. Ricklefs, telah terjadi persaingan yang melahirkan apa yang disebutnya dengan “Kini mulailah zaman yang dikenal sebagai Zaman Pelayaran-Pelayaran “liar” atau “tidak teratur”, yaitu ketika perusahaan-perusahaan ekspedisi Belanda yang saling bersaing untuk memperoleh rempah-rempah Indonesia” (Lihat, Ricklefs, Sejarah Indonesia

Modern 1200-2008, Serambi, 2008, hal. 50). Untuk mengakhiri persaingan di antara perusahaan Belanda itu, maka dibentuklah VOC (*Vereenigde Cost – Indische Compagnie*) = Perserikatan Maskapai Hindia Timur, pada Maret 1602. Berdasarkan hak Oktroi yang diberikan oleh Parlemen, maka VOC mempunyai wewenang untuk mendaftarkan personel atas dasar sumpah setia, melakukan perjanjian-perjanjian di seluruh Asia (Ricklefs, hal. 51)

Selain Kerajaan Belanda, juga ternyata Kerajaan Inggris – yang nanti di dalam perkembangannya dianggap dan memang Inggris sendiri bangga – mampu menjadi penguasa laut dengan kapal-kapalnya, termasuk angkatan lautnya. Bahkan sebenarnya mendahului Belanda di dalam membentuk perusahaan dagang, yaitu pada 1600, saat Ratu Elizabeth I memberi sebuah Oktroi kepada Maskapai Hindia Timur (*The East India Company*). Sir James Lancaster yang memimpin pelayaran pertama maskapai ini. Dia berhasil tiba di Aceh dan terus menuju ke Banten, dimana mendapat izin membangun kantor dagang. Bandar lada yang sangat kaya ini tetap menjadi pusat kegiatan orang-orang Inggris sampai tahun 1682. Lancaster kembali ke Inggris dengan muatan lada yang demikian banyak, sehingga sebagiannya tidak dapat dijual dan para investor pun harus dibayar kembali sebagiannya dalam bentuk lada (Ricklefs, hal. 55)

Ketika Maskapai Hindia Timur melakukan pelayarannya yang kedua 1604, berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda. Tetapi di wilayah-wilayah ini mereka mendapat perlawanan dari pihak VOC. Dengan demikian dimulailah persaingan sengit Inggris-Belanda untuk mendapatkan rempah-rempah. Belanda menuduh Inggris menciptakan “komplotan penyelundup di Maluku” walaupun begitu, selama tahun 1611-1617, orang-orang Inggris juga mendirikan kantor-kantor dagang di Sukadana, Makassar, Jayakarta, dan Jambi (Ricklefs, hal. 55).

Di dalam perkembangannya, VOC, berusaha sekuat tenaganya untuk mempertahankan dominasinya di Nusantara, yang kemudian diganti namanya dengan istilah: *Nedelandsch-Indië* (Hindia Belanda). Pada awalnya, pusat VOC di Maluku, Ambon, tetapi Jan Pieterzoon Coen yang menjadi Gubernur Jenderal (Gubjen) → (1619-1623), (1627-1629), dialah yang menempatkan VOC pada suatu tempat berpijak yang kokoh. Kemudian setelah melakukan pertempuran di Jayakarta dan berhasil menghancurkan tempat itu, maka kemudian Coen mendirikan Batavia, 1619. Usaha merebut Batavia ini menerapkan langkah paling penting yang ditempuh orang-orang Belanda sejak kapal pertama mereka berlayar ke Timur. “VOC kini dapat membangun pusat militer dan administrasi di



tempat relatif aman bagi pergudangan dan pertukaran barang yang terletak di Nusantara bagian barat serta mudah mencapai jalur-jalur perdagangan ke Indonesia Timur, Timur jauh, dan Eropa. Tempat ini berada di bawah kekuasaan VOC tanpa ada satu kerajaan besar Indonesia yang cukup dekat untuk dapat membahayakannya” (Ricklefs hal. 58-59).

Dalam perkembangannya, VOC memang melakukan penaklukan wilayah sampai saat dibubarkannya pada 1799. Dalam periode 1602-1799 itu, dapat dikatakan memang menguasai “wilayah daratan dan laut Nusantara”. Tetapi di dalam usahanya itu, VOC harus berhadapan dengan kerajaan-kerajaan Maritim Nusantara, yang berpegang pada prinsip-prinsip pengaturan hidup kerajaan mereka masing-masing. Dan kerajaan-kerajaan itu telah melakukan reaksi perlawanan yang berlangsung dalam waktu yang tidak dapat dikatakan singkat; walaupun VOC dapat menangkan peperangan di dalam menghadapi perlawanan kerajaan Maritim-Nusantara itu. Itu terjadi di Ternate dan Tidore, Sumbawa.

Kerajaan di Nusantara bagian timur, sekadar sebagai contoh, kerajaan-kerajaan orang-orang Makasar dan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi bagian selatan ini, G.J. Resink memberikan kekayaan yang patut dicatat. “Berlawanan dengan apa yang diterima secara umum tentang perbatasan negara kerajaan-kerajaan Indonesia, diawali oleh Van Vollenhoven dan dilanjutkan oleh Korn, mereka telah menunjukkan bahwa di Sulawesi bagian selatan ada “perbatasan-perbatasan tetap” antara kerajaan-kerajaan Makassar dan Bugis dengan perbatasan-perbatasan yang dengan gigih digambarkan dan diletakkan berabad-abad lalu” (Lihat G.J. Resink, *Bukan 350 Tahun Dijajah*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2013, hal. 35). Selanjutnya, hal yang menarik juga diungkapkan adalah ketika “Makassar dan VOC dalam perjuangan panjang dan sengit pada abad 17 yang berkaitan dengan kewenangan maritim dalam konteks kewenangan yang lebih luas dan kekuasaan di dan terhadap lautan lepas”.

Dalam kaitan dengan lautan sebagai jalur perdagangan, maka seorang ahli, Stapel mengungkapkan bahwa “reaksi penguasa Makassar pada tahun 1615 terhadap upaya para komisioner VOC untuk mencegah semua perdagangan di Kepulauan rempah memiliki nada Ware Liberum:

Tuhan telah menciptakan bumi dan laut, telah membagi bumi di antara umat manusia dan memberikan lautan, untuk bersama-sama. Ini bukanlah hal yang pernah di dengar sebelumnya bahwa siapapun di larang untuk melayari lautan (Resink, hal 35).

Hal yang senada dengan sikap Sultan Hasanuddin ketika menolak pelarangan perdagangan dengan apa yang dikatakan oleh raja pendahulunya. Sultan Hasanuddin menyatakan:

“... yang telah menciptakan dunia agar dapat menikmatinya, atau Anda percaya bahwa Tuhan telah menyediakan pulau ini, begitu jauh dari tempat bangsamu, hanya untuk perdagangan umum sendiri” (Resink, hal. 36)

#### **4. Penutup: Implementasi Berdasar Deklarasi Djuanda, 1957**

Dalam kaitannya dengan implementasi dari penghadapan diri kita sebagai negara-bangsa yang tidak dapat lepas dari realitas hidup kemaritiman kita, maka saya menyatakan bahwa Deklarasi Djuanda sangatlah penting untuk dipahami dan dijalankan lebih lanjut. Karena deklarasi ini sangatlah penting dalam kaitannya dengan konsep Tol Laut dan Poros Maritim Dunia. Dalam kaitan ini pula, saya berpendapat TNI – Angkatan Laut terus dikembang-perkuat untuk menjaga wilayah laut negara kita yang demikian panjang dan luas dan sangat kaya, tidak hanya ikannya tetapi terutama juga tambang-tambang yang terdapat di dalam dasar laut kita.